

ABSTRAK

Wahyuni Fuji Astuti : Pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol

Agar terciptanya keamanan, ketertiban dan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, pemerintah kabupaten bandung menerbitkan peraturan daerah Kabupaten Bandung No 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol guna melindungi masyarakat, namun pada kenyataanya masih jauh dari harapan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 1) pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol, 2) Peran Instansi/Pemerintah setempat terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Penelitian ini ditinjau dari siyasah dusturiyah dalam kaitannya pembuatan undang-undang dan lahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, sebagaimana lahirnya kebijakan pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Bahan hukum yang digunakan ialah data primer yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol, keputusan presiden, dan wawancara kepada pihak-pihak yang menurut peneliti dapat memberikan informasi, data sekunder yaitu Al-Qur'an, data tersier yaitu buku-buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol telah dilaksanakan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan minuman beralkohol, namun Peraturan Daerah ini tidak sepenuhnya terlaksana dengan baik karena banyaknya kendala. Pelaksanaan Peraturan Daerah didukung oleh instansi serta tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan ikut berpartisipasi dalam mencapai masyarakat yang aman dan damai. Adanya kesesuaian Peraturan Daerah dengan siyasah dusturiyah yaitu terbentuknya pemerintah yang berusaha untuk terciptanya kemaslahatan masyarakat dan menolak kemadharatan.